

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Karena rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja yang dapat menduduki kursi pemerintahan salah satunya kursi di parlemen. Namun banyaknya partai politik yang turut ikut dalam kontestasi pemilihan umum mendorong negara untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik, salah satu upaya yang dilakukan dengan ditetapkan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen. Namun penerapan ambang batas parlemen di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut dinilai tidak dapat mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat karena adanya suara yang terbuang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *parliamentary threshold* di Indonesia dan mengetahui bagaimana relevansi *parliamentary threshold* dengan mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative yaitu dengan menelaah masalah hukum dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan cara mencari dan meneliti data sekunder. Spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumen yang disajikan dalam bentuk narasi dan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ambang batas parlemen pertama kali diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yakni sebesar 2,5% yang kemudian direvisi kembali pada UU Nomor 8 Tahun 2012 yakni sebesar 3,5% dan kemudian kembali dinaikkan menjadi 4% menurut UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun adanya ambang batas parlemen tersebut mengakibatkan adanya *wasted votes* dan disproportionalitas kursi di parlemen. Fenomena tersebut bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat oleh J.J Rousseau terkait *volunte generale*.

Kata kunci : Pemilihan umum, *parliamentary threshold*, kedaulatan rakyat